

LHP BPK Bukan Rahasia Negara

Lobi Anggaran, Kompensasi atau Penyuapan

PONTIANAK - Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, bukan dokumen rahasia negara. Publik berhak untuk mengetahuinya. "LHP bukan rahasia negara. LHP merupakan dokumen publik kalau sudah diterima DPRD," kata Kepala Sub Auditorat Kalbar IBPK Perwakilan Kalbar, Hernold F Makawimbang, Senin (21/2), mendampingi Kepala BPK Perwakilan Kalbar Adi Sudiby, saat ramah tamah bersama media massa di Hotel Mercure.

Dia juga menegaskan, bahwa BPK juga lembaga independen yang tidak bisa didikte, diatur oleh siapapun. Termasuk juga presiden. Auditor pun melakukan audit dengan objektif, independen dan profesional. "Objektif, apa yang diperiksa dan

◆ Ke Halaman 7 Kolom 1

LHP BPK Bukan Rahasia Negara

Sambungan dari halaman 1

hasilnya itulah yang disampaikan apa adanya," kata Hernold lagi. Ia juga menegaskan, opini yang dihasilkan oleh BPK dari setiap laporan pemeriksaan, tidak boleh diperjualbelikan. "Kalau diperjualbelikan bisa dipidana. Kita melaksanakan seobjektif mungkin," tegasnya.

Hernold mengungkapkan biasanya ada kecurangan (fraud) dalam siklus anggaran. Proses pertama adalah perencanaan anggaran pemerintah. Dia menjelaskan, bisa terjadi pemerintah melakukan markup volume dan biaya dalam perencanaan pekerjaan. Merekayasa kegiatan untuk pembiayaan kegiatan pimpinan. Merekayasa spesifikasi teknis yang hanya dimiliki oleh konsorsium, perusahaan tertentu. "Misalnya dana DAK. Program dirancang dari pusat, karena tidak ada yang mengerjakannya di daerah akhirnya datang konsorsium dari pusat. Akhirnya kasihan kepala se-

kolah yang bertanggungjawab," tegasnya.

Kemudian siklusnya, kata dia, adalah penetapan anggaran di legislatif. Terkadang, tegasnya, terjadi usulan kegiatan baru muncul yang tidak direncanakan pemerintah. Bahkan, hingga memintajatah pekerjaan atau jatah uang pengesahan. "Lobi anggaran dengan kompensasi pekerjaan atau penyuapan," tegas Hernold. Siklus berikutnya adalah pelaksanaan anggaran di pemerintah, ada pelaksanaan pekerjaan volumenya diturunkan, harga dinaikkan. Kemudian bisa terjadi rekayasa pekerjaan fiktif, kualitas barang pengadaan rendah sehingga memperoleh keuntungan yang tidak wajar.

Lalu, pertanggungjawaban anggaran di pemerintah juga terjadi laporan fiktif atau tidak sesuai kondisi, rekayasa bukti fiktif, serta laporan pertanggungjawaban tidak lengkap atau tidak dibuat. "Usaha untuk menutupi perbuatan fraud, di-

lakukan penyuapan, pemberian fasilitas dan pemberian pekerjaan kepada (oknum) petugas pemeriksa, aparat penegak hukum dan (oknum) hakim," jelas Hernold. Ia menambahkan, pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara atau daerah atau unsur pidana.

"Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya lagi.

Adi Sudiby menjelaskan bahwa tugas BPK berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK, adalah memeriksa pengelolaan keuangan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Dae-

rah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD dan DPRD serta pemerintah.

Disinggung mengenai sejak hadirnya BPK RI di Kalbar, berapa nilai kerugian negara yang dilakukan apartur di Kalbar? Pihak BPK tampak tak bisa merinci atau mengira. "Sebenarnya LHP setiap tahunnya bisa diakses oleh publik. Namun untuk rincinya mungkin dari BPK perwakilan Kalbar dapat menjelaskannya," kilahnya. Tetapi, Adi Sudiby juga tak siap. Didesak perkiraan kerugian yang dialami dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pun belum bisa memuaskan keinginan para wartawan. (ody)